



H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI RABU / 11 November 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

KPK BIDIK KEPALA DAERAH

Sebulan jelang hari pencoblosan Pilkada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan memberikan 'warning' kepada para pasangan calon (Paslon) agar berhati-hati dalam menjalankan amanat jabatannya bila terpilih nanti. Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (10/11) mengatakan akan ada 2 kepala daerah yang ditahan pada minggu depan. Tak perlu menunggu sepekan, ternyata dalam hitungan jam komisi anti-rasuah ini telah menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus sebagai tersangka kasus mafia anggaran dan langsung menahannya. Selanjutnya siapa?



SCAN ME

Baca Hal 11



KEPALA DAERAH
TERSANGKA
KORUPSI DI 2020

BUPATI SIDOARJO SAIFUL ILAH (JANUARI 2020)

Dalam OTT, uang senilai total Rp 1.813.300.000, disita KPK terkait dugaan kasus suap proyek infrastruktur Selasa (7/1/2020).



BUPATI KUTAI TIMUR ISMUNANDAR (JULI 2020)

Dalam OTT Kamis (2/7/2020) ditemukan duit Rp 170 juta dan beberapa tabungan dengan total Rp 4,8 miliar diduga terkait suap pekerjaan infrastruktur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019-2020.



WALI KOTA TASIKMALAYA BUDI BUDIMAN (OKTOBER 2020)

Jadi tersangka kasus dugaan suap ke mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo per Jumat (23/10/2020). Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018



BUPATI LABUHANBATU UTARA KHARUDDIN SYAH ALIAS BUYUNG (NOVEMBER 2011)

Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi mafia anggaran Selasa (10/11/2020). Kharuddin disebut memberikan gratifikasi senilai Rp 400 juta dan SGD 290 ribu kepada Yaya Purnomo terkait dana alokasi khusus (DAK) Labuhanbatu Utara 2018.



UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	444,348	375,741	14,761
Seluruh Dunia	51,210,761	36,022,312	1,268,502

Update : 10 November 2020 Pukul 17.00 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

TETAP WASPADA, 19 WILAYAH JADI ZONA MERAH CORONA

Jakarta-Juru bicara pemerintah dan Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan pemda dan masyarakat tetap waspada terhadap pandemi virus corona. Pasaunya, saat ini ada 19 kabupaten/kota yang statusnya naik dari zona oranye ke merah.

"Ada 19 kabupaten/kota yang ada di zona oranye dan seharusnya bisa ke zona kuning, justru berpindah ke zona merah," ujar Prof Wiku saat konferensi pers secara virtual, Selasa (10/11). "Perlu kami sampaikan, apabila pemda dan masyarakatnya lengah, maka kabupaten/kota di zona oranye bisa berpindah ke zona merah dan ini terjadi ke-19 kabupaten/kota, pekan ini. ini menunjukkan bahwa pemda dan masyarakatnya lengah," imbuh Wiku.

Wiku merasa banyak daerah yang merasa aman meski berstatus zona oranye. Padahal, status ini menunjukkan risiko penularannya tinggi. "Zona oranye masih bahaya dan berisiko tinggi tingkatan penularan. Semakin daerah merasa aman di zona oranye, mereka buka peluang daerahnya masuk zona merah," tegas Wiku.

Selain itu, Wiku juga menjelaskan perubahan status pada 33 kabupaten/kota yang sebelumnya zona kuning namun malah naik ke zona oranye. Wiku pun menyayangkan kondisi ini. "Perkembangan zonasi risiko terlihat ke arah yang kurang baik di pekan ini. Ini sangat disayangkan bahwa ternyata ada 33 kabupaten/kota yang pada pekan sebelumnya ada di zona kuning, namun di pekan ini berpindah menjadi ke zona oranye," terangnya.

Prof Wiku Adisasmito menyampaikan

terjadi penambahan kasus sebesar 8,2 persen dibanding pekan sebelumnya. Ia menyebut meningkatnya kasus positif ini merupakan perkembangan yang kurang baik. Sementara itu, Wiku menyebut penurunan tren kasus positif pada minggu lalu juga disebabkan testing yang menurun pada saat masa libur panjang cuti bersama, oleh sebab itu ia meminta agar testing tetap digencarkan. "Jangan sampai terlihat penurunan kasus semu. Penurunan kasus minggu lalu ternyata terjadi karena tes menurun. Hal ini menjadi pembelajaran terlepas dari masa libur," ungkap Wiku. "Kenaikan berpusat pada Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Di mohon kepada 5 provinsi ini untuk jangan lengah."

Sementara itu, perkembangan kasus Corona di tanah air hari ini bertambah 3.779 kasus, kasus aktifnya 53.846 atau 12,1 persen. Sedangkan kasus aktif dunia saat ini 27,16 persen.

Dengan penambahan ini, maka kini total kasus positif COVID-19 sebanyak 444.348. Sementara total pasien meninggal mencapai 14.761 orang. Kabar baiknya, jumlah pasien positif corona yang sembuh juga semakin bertambah banyak. Per hari ini, dilaporkan 3.475 pasien sembuh dari corona, sehingga totalnya jadi 375.741 orang.

282 Dokter dan Perawat Meninggal

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang wafat akibat Covid-19. Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi mengatakan,

sejak Maret hingga November ini, terdapat total 282 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19.

"Yang terdiri dari 159 dokter dan 9 dokter gigi, dan 114 perawat," ujar Adib dikutip dari siaran pers IDI, Selasa (10/11).

Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 84 dokter umum, 73 dokter spesialis, serta 2 residen yang berasal dari 20 IDI Wilayah (provinsi) dan 71 IDI Cabang (kota/kabupaten). Adib memaparkan, menurut data provinsi, jumlah kematian dokter tercatat paling banyak terjadi di Jawa Timur (36 dokter).

Kemudian disusul DKI Jakarta (26 dokter), Sumatera Utara (24 dokter), Jawa Barat (12 dokter), Jawa Tengah (11 dokter), Sulawesi Selatan (7 dokter), Banten (6 dokter), Bali (5 dokter), dan Kalimantan Timur (5 dokter).

Selanjutnya, Aceh (5 dokter), Riau (4 dokter), Kalimantan Selatan (4 dokter), Sumatera Selatan (3 dokter), Kepulauan Riau (3 dokter), DI Yogyakarta (2 dokter), Nusa Tenggara Barat (2 dokter), Sulawesi Utara (2 dokter), Papua Barat (1 dokter), Sumatera Barat (1 dokter), Bengkulu (1 dokter), dan masih ada satu dokter menunggu verifikasi.

"Dalam situasi pandemi saat ini, para petugas medis dan kesehatan adalah pahlawan dalam arti sebenarnya. Mereka berani dan kuat pada saat ketakutan," kata Adib. Oleh karena itu, paling tidak yang bisa masyarakat lakukan adalah mematuhi protokol kesehatan dan memberikan dukungan moral dan mental. (ist)

19 KABUPATEN/KOTA YANG KINI BERSTATUS ZONA MERAH

1. Kota Bengkulu, Bengkulu
2. Bantul, DIY
3. Karawang, Jabar
4. Bekasi, Jabar
5. Cilacap, Jateng
6. Magelang, Jateng
7. Karanganyar, Jateng
8. Semarang, Jateng
9. Kota Tegal, Jateng
10. Tanah Bumbu, Kalsel
11. Kota Waringin Timur, Kalteng
12. Sukamara, Kalteng
13. Sumbara, NTB
14. Kota Bima, NTB
15. Kota Kupang, NTT
16. Banggai Kepulauan, Sulteng
17. Kota Tomohon, Sulut
18. Tanah Datar, Sumbar
19. Kota Gunungsitoli, Sumut



RUU LARANGAN MINUMAN KERAS MULAI DIBAHAS

Jakarta-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol). RUU ini merupakan usulan dari beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra.

Tujuan dari disodorkannya RUU ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol. "Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Selain itu untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum alkohol," ujar Anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal dalam rapat baleg, Selasa (10/11).

Permohonan harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol yang ditandatangani oleh 21 orang pengurus. Rinciannya 18 orang anggota dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari F-Gerindra. Surat permohonan harmonisasi dan pembahasan RUU tersebut dibuat pada tanggal 24 Februari 2020, dan di-

terima oleh Baleg DPR RI pada tanggal 17 September 2020 lalu.

Menurut Illiza minuman beralkohol selama ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif terhadap kehidupan sosial dan bahkan ekonomi masyarakat. Ia memaparkan data WHO tahun 2011 yang mencatat bahwa ada sebanyak 2,5 juta orang yang meninggal akibat minuman beralkohol dan 9% di antaranya merupakan usia produktif. Di tahun 2014, data rata-rata kematian akibat minuman beralkohol meningkat menjadi 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua jenis kematian.

Kemudian Illiza juga membandingkan pengaruh minuman beralkohol terhadap pendapatan dengan risiko yang ditimbulkannya. Penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dari tahun 2014-2016 hanya sekitar Rp 5,3 triliun. "Pendapatan dari minuman beralkohol itu tidak sebanding dengan risikonya," sambungnya.

Untuk itu, para pengurus berharap lewat RUU ini bakal ada penerapan larangan

secara tegas sekaligus sanksi atas penggunaan minuman beralkohol di Indonesia. "Aturan minuman beralkohol hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, di mana dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UU dan tidak mengatur sanksi," sambungnya

Untuk diketahui, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. RUU ini juga sempat membuat heboh warganet beberapa bulan lalu saat draft-nya beredar di media sosial.

Namun, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek), RUU yang muncul di medsos tadi adalah draf lama yang dibuat tahun 2015 silam. Draft RUU ini ternyata baru diterima Baleg pada 17 September 2020. Maka dari itu, RUU tersebut baru dibahas hari ini. Itupun, masih akan mengalami penyesuaian atau harmonisasi seiring dengan masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak lain sebelum akhirnya disodorkan ke pemerintah pusat. (ist)

MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

DI JAMAN BELANDA

Arak, tuak, ciu atau lapen diatur oleh Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Nomer 90 en 92.

Bir diatur oleh Bieraccijns Ordonnantie Stbl 1931 Nomer 488 en 489.

SETELAH MERDEKA

Indonesia mengikuti jejak Belanda dalam memungut cukai dari perdagangan minol.

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1947 tentang cukai minuman keras. (produksi, hukuman, denda)

2 LARANGAN YANG DIUSULKAN DALAM RUU TERSEBUT

1. Setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan memabukkan.
2. Setiap orang yang menggunakan, membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan memabukkan untuk kepentingan terbatas harus berusia minimal 21 tahun dan wajib menunjukkan kartu identitas pada saat membeli di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

2015

Larangan minol di minimarket penerima cukai tersendat 4,6 triliun dari target APBN 2015 Rp 6,5 triliun

2016

Pemerintah berencana menaikkan kembali cukai minol Rp 6,6 Triliun

MENANGGUK CUKAI MINOL

PENDAPATAN PEMERINTAH DARI MINOL

Tahun	Pendapatan (Rp triliun)
2012	3,32
2013	4,56
2014	5,3

KENAIKAN CUKAI

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 207/PMK.011/2013, tertanggal 31 Desember 2013

KENAIKAN TARIF CUKAI MMEA

MMEA golongan A (Alkohol kurang sama dengan 5%)

MMEA golongan B (5-20%)

MMEA golongan C (Alkohol lebih sama dengan 20%)

Dinakini moderat berkisar mulai Rp 2000 - 9000 per liter dengan rata-rata kenaikan 11,56%

TREM BATERAI RP 12,5 M PRODUKSI INKA UJI PERFORMA DI REL DAOP 7

Madiun - PT. INKA lakukan uji coba trem bertenaga baterai di rel Stasiun Daop 7 Madiun - Stasiun Babadan. Langkah ini dilakukan guna menilai performa kereta sebelum diproduksi secara massal. Sebelumnya, kereta tersebut telah diuji coba di rel internal PT. INKA.

Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro menyampaikan, tes performa tersebut baru dilakukan pertama kali di rel yang sebenarnya. Setelah mendapat ijin dari Vice President Daop 7 Madiun, PT. INKA melakukan uji coba selama 2 hari berturut-turut, sejak Senin hingga Selasa kemarin (09-10/11). Meski mampu bermanuver hingga 60 km/jam, namun saat uji coba tetap mengikuti aturan dari Daop 7 untuk berjalan dengan kecepatan 20 km /jam. Dalam uji coba ini, trem langsung dikendalikan oleh masinis dari PT. KAI Daop 7.

"Kalau Daerah Daop 7 saja itu cukup persetujuan Kadaop. Tapi kalau uji cobanya antar Daop. Itu ijinnya sampai kantor pusat. Ini ada prosedur yang kita penuhi," jelas Budi, Selasa (10/11).

Uniknya, prototipe trem dengan tenaga baterai 30kWh tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan sisa dan tidak terpakai yang ada di PT. INKA. Bahan baku yang baru akan digunakan ketika sudah ada pesanan. Pembuatannya pun dilakukan mulai dari nol,



Trem bertenaga baterai produksi PT INKA (kiri) uji coba di rel Stasiun Daop 7 Madiun

baik desain, komponen motor dan gerbong semua produksi PT. INKA. "Baterai ini sebenarnya sudah 2 tahun, ini batrei lama. Ketahanan sampai 8 tahun," imbuhnya.

Trem yang dijual dengan harga Rp 12,5 miliar tersebut diharapkan menjadi terobosan Indonesia Go Green. Selain ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi, trem tersebut juga murah dalam perawatan berkala dan aman dalam operasionalnya. Untuk diketahui, satu set prototipe trem ini terdiri dari dua car, satu car dengan unit penggerak

yang dilengkapi dengan baterai. Car berikutnya merupakan kereta penumpang.

Terkait tantangan pengembangan di dalam negeri, Budi mengatakan selama ini baterai yang ada di Indonesia merupakan impor. Dia berharap agar pemerintah dapat segera membangun pabrik baterai di dalam negeri. Mengingat kedepannya transportasi dengan menggunakan tenaga baterai akan diproduksi massal. "Ke depan pasti begitu. Eranya (pakai batrei, red) begitu, inovasi green," pungkasnya. (Ger)

ADA 66 ADUAN BANSOS DI SURABAYA, 54 SUDAH DITINDAKLANJUTI

Surabaya-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Inspektorat memastikan hanya menerima 12 laporan baru yang berasal dari laman JAGA Bansos milik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebelumnya pada September 2020 ada 55 laporan masuk, yang salah satu diantaranya gugur. Sehingga hingga kini total ada 66 laporan

Dari jumlah 55 laporan yang sudah pernah disampaikan kepada media Bulan September lalu, 54 diantaranya sudah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan satu laporan lagi tidak memenuhi syarat karena tidak ada feedback dari pelapor, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

"Dari Bulan September hingga 7 November 2020, ada 12 laporan baru yang masuk, sehingga totalnya 66 laporan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan klarifikasi dan ditindaklanjuti, bukan 73 laporan," kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari dikutip Selasa (10/11).

Menurutnya, 12 laporan baru yang masuk itu pun ada 9 laporan yang sudah selesai ditindaklanjuti. Sementara 3 laporan sisanya sedang diminta untuk melengkapi beberapa dokumen atau bukti pendukung. Kelengkapan ini sudah diatur dalam tata cara pengaduan melalui JAGA Bansos.

"Jadi, posisinya sekarang Pemkot Surabaya masih menunggu bukti-bukti 3 pelaporan itu. Namun, pemkot tetap meneliti informasi awal ini, karena bagi kami ini informasi awal untuk melakukan penelitian

dan verifikasi ke lapangan," katanya.

Ia juga menjelaskan, aplikasi JAGA Bansos milik KPK ini bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. Laporan masyarakat yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan dikirimkan ke pemerintah kota/kabupaten atau pemerintah provinsi terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke lapangan.

Namun demikian, dari laporan yang masuk ke JAGA Bansos itu, KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti dan mana yang tidak layak ditindaklanjuti. Sedangkan laporan yang layak untuk ditindaklanjuti, maka KPK akan mengirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.

"Setelah itu, baru kita-kita yang ada di pemerintah daerah, menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah diteliti di lapangan, kemudian kami harus mengirimkan laporan tindaklanjut itu ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai," ungkap dia.

Basari juga memastikan bahwa laporan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos KPK itu bukan terkait penyimpangan atau hal-hal yang negative dan melanggar hukum, seperti pengurangan isi atau pengurangan nominal bantuan, itu tidak ada. Namun, laporan yang diterima itu rata-rata terkait belum menerimanya bansos hingga keterlambatan mengambil bantuan.

"Jadi kami pastikan bahwa rata-rata pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya



Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari

bukan penyimpangan atau penyalahgunaan yang berdampak pada kerugian negara, tapi laporan itu lebih kepada belum menerima bansos, mungkin itu warga yang baru terdampak. Kan memang belum tercatat, dan sepanjang tidak menerima double (bantuan), pasti akan diproses dan kalau memang layak pasti akan diberi," jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, sepanjang warga itu memenuhi syarat untuk menerima bantuan, pasti jajaran Pemkot Surabaya akan memproses bantuan tersebut. Apalagi bantuan itu berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi dan bantuan dari pemkot sendiri.

"Makanya sampai saat ini Camat dan Lurah terus mencari warga mana saja yang terdampak. Kami juga perlu pastikan bahwa pemkot sangat fast respon jika ada keluhan-keluhan semacam ini. Buktinya, kita langsung menindaklanjuti 12 laporan baru, sehingga 9 laporan sudah selesai," pungkasnya. (ard)

BAWASLU USUL KPU TAK GUNAKAN SIREKAP

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) dalam pilkada 2020. Bawaslu berencana mengusulkan hal tersebut secara resmi melalui surat kepada KPU.

"Kami sudah menyusun draf surat ke KPU. Bawaslu mengusulkan untuk tidak menggunakan Sirekap," ujar anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dikutip website resmi Bawaslu RI, Selasa (10/11).

Dia mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih meragukan kesiapan KPU untuk menerapkan Sirekap tahun ini. Beberapa alasannya karena sumber daya manusia (SDM) KPU di jajaran penyelenggara ad hoc belum siap, baik kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Setahu kita, berdasarkan pengalaman di Pemilu atau Pilkada, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahapan pemungutan dan penghitungan lebih banyak karena faktor SDM,"

ungkap koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu itu.

Selain itu, Dewi menilai, pemberian bimbingan teknis (bimtek) kepada penyelenggara ad hoc sangat terbatas waktunya. Hal ini juga berdasarkan pengalaman bimtek yang dilakukan KPU pada masa-masa sebelumnya. "Tentu dengan penerapan sirekap butuh bimtek yang lebih memadai lagi. dari sisi sdm, kami khawatir ini akan memengaruhi kualitas pemilihan kita," kata dia.

Pertimbangan usulan penolakan sirekap berikutnya, terkait ketersediaan jaringan internet. Ketersediaan perangkat yang akan digunakan penyelenggara ad hoc untuk mendokumentasikan atau memotret formulir model c-hasil-KWK yang diunggah ke aplikasi sirekap.

Dari segi hukum pun, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada butir-butir yang mengatur rekapitulasi elektronik. menurutnya, UU memerintahkan proses rekapitulasi wajib dilakukan secara manual dengan ketentuan memberikan berita acara (BA) hasil peng-



Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo

hitungan rekapitulasi." dengan Sirekap berarti tidak ada lagi BA dalam bentuk fisik, semuanya dalam bentuk elektronik. Nah ini kita akan kesulitan dalam melakukan penanganan pelanggaran," tutur Dewi.

Dia berharap, usulan Bawaslu ini dapat disetujui KPU, mengingat beberapa risiko jika sirekap tetap diterapkan di pilkada 2020. "Kita berharap usulan ini nanti bisa disetujui karena besar resiko yang harus kita tanggung. Mudah-mudahan surat Bawaslu bisa direspon secara baik oleh KPU," tutupnya. (ist)

MESKI PANDEMI, PARTISIPASI PEMILIH DITARGET NAIK JADI 77,5%

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakin partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan meningkat ketimbang pilkada sebelumnya. Pandemi Covid-19 diyakini tidak akan menghalangi partisipasi masyarakat.

"Mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, dikutip Selasa (10/11).

Hudori mengatakan tren partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya cenderung meningkat. Pada 2015, partisipasi pemilih mencapai 70 persen. Kemudian meningkat menjadi 74,5 persen pada 2017. Namun, tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 73,24 persen pada 2018.

Pada Pilkada 2020, pemerintah berharap target pemilih yang telah ditetapkan sebesar 77,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.000.359.152 orang bisa tercapai. "Harapan kami, partisipasi pilkada di tahun 2020 semakin naik. Mudah-mudahan dengan adanya covid tidak ada pengaruhnya," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia meyakini partisipasi pemilih dalam pilkada tetap tinggi meski tengah pandemi. Tingginya partisipasi pemilih dapat menjadi salah satu indikator kualitas pelaksanaan pilkada.

"Kita punya benchmark sebetulnya di Tahun 2019, rata-rata (partisipasi) 83 persen

secara nasional, walaupun enggak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap pilpres lebih tinggi dibandingkan pilkada. Saya kira target 77 persen itu realistis," kata Doli di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020

Tak Ada Zona Merah

Data Kemendagri, tidak terdapat zona merah pada daerah yang menggelar Pilkada 2020 di 14 provinsi. Hal ini berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 12 Oktober 2020 lalu. "Daerahnya ada di sekitar 14 provinsi yang tidak ada zona merah," ujar Hudori.

Menurut dia, kondisi kasus Covid-19 di suatu daerah bukan karena ada pilkada atau tidak, melainkan perilaku disiplin dalam protokol kesehatan atau tidak. Pilkada serentak tahun 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ia meminta pemerintah daerah segera selesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Kemendagri mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada 2020 tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. "Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon," kata Hudori. (ist)



A photograph of Jennifer Lawrence on a red carpet. She is wearing a long, shimmering, sequined gown and has her arms raised in a celebratory gesture. Behind her, a man in a tuxedo is smiling. The background features large, stylized Oscar statuette graphics on a red and gold backdrop.

Jennifer Lawrence

**MENARI BAHAGIA
RAYAKAN KEMENANGAN
JOE BIDEN**

Aktris Jennifer Lawrence termasuk salah satu sosok yang berbahagia atas kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020.

Sebagai cara mengekspresikan kebahagiaannya, dia berlari mondar-mandir di trotoar perumahan di Boston, bersorak, dan menari bahagia. Sementara jalan raya saat itu tampak lengang, hanya ada beberapa pejalan kaki dan mobil dari kejauhan.

Bintang "The Hunger Games" itu mengenakan masker wajah bermotif macan tutul, mengunggah video di halaman Twitter-nya mengenai perayaan ini.

Laman Eonline, Minggu mencatat, ini video pertama yang pertama kali dia bagikan pada publik melalui media sosial. Dia menulis, "Tidak ada pilihan selain mengadakan pesta untuk 1 #comeonbostonletsparty."

Lawrence mengumumkan di Twitter untuk pertama kalinya pada bulan Juni lalu fokus untuk menentang ketidakadilan sosial. Laman akunnya mendukung kampanye antikorupsi, RepresentUS. Dia menjadi salah

satu dari beberapa selebritas yang menjadi anggota dewan budaya inisiatif.

Pada 21 Oktober lalu, Lawrence secara terbuka mengungkapkan pandangan politiknya, dulu dan sekarang. Dia berkata di podcast "Absolutely Not" kalau dia tumbuh sebagai Republikan dan dibesarkan untuk melihat keuntungan fiskal dari beberapa kebijakan partai Republik.

Pada tahun 2008, dia mengungkapkan pilihannya pada kandidat Presiden dari Partai Republik John McCain.

"Sangat sulit untuk membicarakan politik. Aku seorang aktor, aku ingin semua orang melihat filmku," kata dia.

Jennifer Shrader Lawrence (30th) adalah aktris asal Amerika Serikat. Film-film yang dibintanginya sukses meraup lebih dari 6 Miliar dolar AS di seluruh dunia. Lawrence telah memenangkan berbagai penghargaan sebagai Aktris Terbaik, diantaranya satu Academy Award, tiga Golden Globe Award, satu BAFTA Award, dan masih banyak lagi.

Lawrence adalah aktris dengan bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2015 dan 2016.

Lawrence juga menempati posisi puncak dalam daftar 100 tokoh berpengaruh di dunia versi Time untuk tahun 2013 juga dalam daftar Forbes Celebrity 100 untuk tahun 2014 dan 2016. Ia juga dinobatkan oleh FHM sebagai "The Sexiest Woman in the World" untuk tahun 2014.

Lawrence pertama kali mendapat peran utama saat bergabung untuk membintangi seri komedi televisi TBS berjudul "The Bill Engvall Show" (2007-2009). Setelahnya, Lawrence mulai menembus perhatian para kritikus film saat berperan menjadi bintang utama dalam film karya sutradara Debra Granik: "Winter's Bone" (2010).

Karir Lawrence mulai melesat saat ia terpilih untuk memerankan karakter Mystique dalam seri film X-Men (2011-2019). Namanya kian menjadi pusat perhatian media perfilman dunia setelah sukses besar dalam memerankan Katniss Everdeen dalam seri film The Hunger Games (2012-2015) dan telah dinobatkan sebagai "karakter action-heroine terlaris sepanjang masa" (1st).



BELUM ADA BUKTI MASKER SEBABKAN BAU MULUT

Foto : Anastasiia Chepinska/Unsplash

Beberapa orang merasa masker yang mereka kenakan menyebabkan bau mulut atau infeksi pada gigi mereka. Benarkah masker menjadi penyebabnya?

Para pakar kesehatan gigi membantahnya. Menurut mereka, saat ini belum ada bukti yang menyatakan masker bisa menyebabkan masalah pada gigi termasuk bau mulut.

"Tidak ada bukti memakai masker menyebabkan atau memperburuk penyakit gigi. Jika ini benar-benar masalah, dokter gigi dan penyedia layanan kesehatan lainnya akan

mengalami peningkatan penyakit dan masalah gigi, dan itu belum dilaporkan," kata dokter bedah gigi, Steven Barefoot dari klinik DentaQuest seperti dilansir dari Medical Daily (Minggu, 8/11/2020).

Dokter Weiner dari Envy Smile Dental Spa di New York City juga membantah masker bisa menimbulkan risiko kesehatan gigi. Dia mengatakan, "Saya dapat membuktikan fakta menghirup karbon monoksida yang kita keluarkan kembali ke paru-paru dan mulut bukanlah yang terbaik untuk gigi kita, tetapi

masker tidak menyebabkan bau mulut."

Menurut dia, masker justru membuat Anda lebih menyadari jika Anda ternyata memiliki bau mulut.

Hal senada juga disampaikan dokter Jared Cox dari Today's Family Dentistry di Searcy, Ark. Dia menuturkan, masker dapat mengungkapkan Anda tak cukup membersihkan mulut dan meningkatkan kesadaran Anda untuk lebih memperhatikan perawatan mulut kita setiap hari. "Jangan salahkan maskernya. Bertanggung jawablah atas kesehatan Anda," tutur dia.



Jika masker tidak menyebabkan bau mulut, penyebab masalah ini antara lain sisa makanan, bakteri, dan kondisi mulut kering.

Barefoot mengatakan, menjaga kebersihan mulut dengan baik akan menghilangkan plak lengket yang menjebak partikel makanan dan menyediakan rumah bagi bakteri. Menyikat dan membersihkan gigi setiap hari akan sangat membantu menjaga kesehatan mulut yang baik dan menghilangkan halitosis (bau mulut).

Selain itu, jangan lupakan asupan air. Minumlah banyak air untuk memerangi potensi mulut kering sekaligus untuk membersihkan sisa makanan yang Anda santap.

Di sisi lain, Weiner memberi tahu cara menghindari mulut kering juga bisa dengan

menghindari minuman asam sebanyak mungkin.

"Saya juga sangat merekomendasikan mint, karena mendorong aliran air liur. Permen juga akan membantu menutupi bau mulut yang Anda miliki," ujar dia.

Barefoot menambahkan, racun yang dikeluarkan bakteri juga menghasilkan bau. Menurut dia, saat Anda merasa ada sesuatu yang berbeda atau tampak berbeda dengan mulut atau napas Anda, segeralah mengunjungi dokter gigi untuk mendapatkan pemeriksaan.

Penelitian menunjukkan, memakai masker efektif dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Benda ini tidak akan mengganggu kesehatan gigi Anda (Ant).



GOOGLE ONE

APLIKASI EDITING FOTO BERBAYAR

Menjadi salah satu aplikasi manajemen dan pengeditan foto favorit, Google disinyalir berusaha untuk memonetisasi Google Photos dengan menghadirkan layanan berlangganan.

Dikutip dari The Verge (Minggu, 8/11/2020) layanan berlangganan ini memungkinkan pengguna bisa menerima pilihan 10 foto cetak setiap bulan, serta fitur pengeditan eksklusif untuk pelanggan Google One.

XDA Developers mengulik kode untuk pembaruan terbaru Google Photos. Mereka menemukan adanya string yang dengan jelas

mengarah ke aplikasi yang bergerak ke beberapa dugaan.

Pertama, sebagai anggota Google One, pengguna bisa mendapatkan akses ke fitur pengeditan tambahan.

Pengguna yang berlangganan bisa membuka lebih banyak fitur pengeditan dan ruang penyimpanan (storage amount) dengan keanggotaan Google One.

Tetapi ini bukan hanya cuplikan kode tersembunyi; tampaknya Google sedang menguji pendekatan ini dengan beberapa orang.

Namun, Google memberi tahu The Verge bahwa itu sebenarnya tidak mengunci fitur "color pop" gratis. Menurut Google, ini hanya menawarkan versi baru yang dapat digunakan pada lebih banyak foto daripada sebelumnya.

Di Google Photo, "color pop" adalah fitur yang terus tersedia bagi siapa saja untuk digunakan, tanpa biaya, untuk foto dengan informasi kedalaman (seperti mode potret).

Sebagai bagian dari peluncuran berkelanjutan yang dimulai awal tahun ini, anggota Google One dapat menerapkan fitur tersebut ke lebih banyak foto orang, ter-

masuk foto yang tidak memiliki informasi mendalam.

Google belum memberi tahu soal fitur pengeditan lain yang mungkin diputuskan untuk ditawarkan secara eksklusif kepada pelanggan Google One, dengan mengatakan "Tidak ada yang dapat dibagikan".

Dengan langganan bulanan mulai dari 1,99 dolar AS per bulan (untuk 100 GB penyimpanan cloud yang tersebar di seluruh layanan Google), Google One tidak terlalu mahal.

Ini juga digunakan untuk backup perangkat Android, dan perusahaan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menambatkan fitur VPN untuk pelanggan Google One dengan paket 9,99 dolar AS per bulan (penyimpanan 2TB). (Ant)



6 SAYURAN TAK CUMA DIMAKAN, TAPI BISA JADI BAHAN MERAWAT WAJAH



Meskipun produk perawatan kulit yang tersedia secara komersial dapat membantu mengatasi masalah kulit, namun sisi negatifnya produk tersebut mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Lebih baik menggunakan bahan-bahan alami seperti sayur-sayuran agar dapat mengatasi masalah kulit. Resep masker ini dapat membantu melawan jerawat, ruam, kekeringan, dan lainnya.

MASKER WAJAH BIT MERAH

Bit merah kaya akan vitamin C, bit bertindak sebagai agen penghalus kerut. Ini juga bantu hilangkan noda yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar matahari sekaligus memastikan warna kulit yang me-rata. Caranya, kupas bit dan potong menjadi empat bagian. Tambahkan 2 sendok makan krim asam atau yoghurt. Campurkan se-muanya dan masker siap. Oleskan masker dengan lembut ke wajah Anda dan bilas setelah 15 menit.

MASKER WAJAH MENTIMUN

Mentimun adalah salah satu makanan paling populer untuk kecantikan dan perawatan kulit. Ini mengandung 80% air dan membantu melembabkan kulit. Caranya, haluskan mentimun yang baru dipotong. Saring jus dan peras lemon ke dalamnya agar dapat menggunakannya nanti sebagai toner. Sekarang, oleskan mentimun tumbuk di wajah dan biarkan selama sekitar 15 menit sebelum dicuci.

WORTEL DAN PASTA KENTANG

Wortel memiliki. Beta karoten, senyawa yang ada dalam sayuran ini akan mempercepat proses penyembuhan dengan mengurangi peradangan. Sedangkan, kentang membantu mencerahkan kulit dan menghilangkan flek hitam. Caranya, potong satu wortel, satu kentang dan beberapa kubis menjadi potongan-potongan kecil. Rebus hingga lembut sebelum dihaluskan. Tambahkan satu sendok teh susu untuk membentuk pasta yang halus. Oleskan di wajah Anda, gosok dengan hati-hati dalam gerakan melingkar.

JUS LOBAK DAN WORTEL

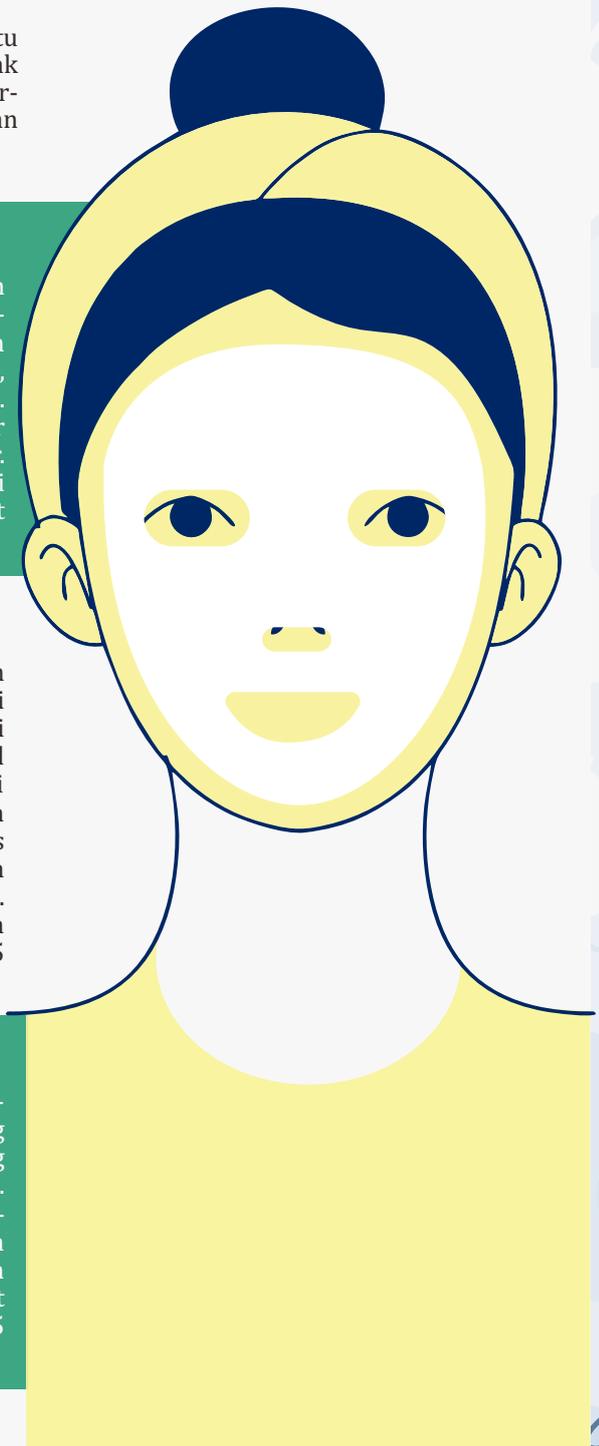
Lobak mengandung vitamin C, seng, dan fosfor dan itu harus menjadi bagian dari rutinitas perawatan jika ada masalah seperti kekeringan, jerawat, dan ruam. Jus wortel juga bertindak sebagai agen anti-inflamasi dan membantu Anda menangkal jerawat dan ruam. Caranya, ambil satu sendok teh jus lobak, satu sendok teh jus wortel, satu putih telur dan satu sendok teh tepung terigu. Campur semua bahan menjadi satu. Oleskan di area yang terkena dan biarkan selama 15 menit.

TOMAT

Tomat kaya akan potasium, vitamin C, antioksidan seperti likopen dan juga sifat astringent. Tomat adalah pilihan terbaik untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti kerusakan akibat sinar matahari, kusam, penumpukan minyak, komedo hitam, dan sebagainya. Caranya, hancurkan satu tomat dan tambahkan satu sendok makan jus lemon. Oleskan di wajah dan biarkan mengering. Bilas bersih dengan air dingin setelah 15 menit.

KENTANG

Kentang kaya akan potasium yang melembabkan dan melembabkan kulit. Kentang juga dilengkapi dengan vitamin B6, yang meningkatkan pembentukan sel baru. Kalsium yang ada dalam kentang menyembuhkan masalah kulit kering. Caranya, hancurkan kentang dengan baik dan campur dengan susu dingin. Pijat wajah dengan lembut selama beberapa waktu. Biarkan selama 5 menit sebelum dibilas dengan air dingin. (Ist)



KPK Bidik (dari hal 1)

Awalnya Firli memberikan pembekalan bagi para calon kepala daerah dari Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Kegiatan itu turut diikuti penyelenggara pemilu. "Terbanyak yang tertangkap korupsi karena suap itu tahun 2018, 30 kali orang tertangkap tangan karena korupsi. Dan 30 kali itu 22 kepala daerah, setahun. Pilkada 2018 tertinggi," ujar Firli saat Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan kanal YouTube KPK, Selasa (10/11).

Selain itu, Firli menyebut sebaran kasus korupsi di 34 provinsi di Indonesia. Menurut Firli, terjadi kasus korupsi yang ditangani KPK di 26 provinsi dari 34 provinsi sepanjang 2014-2020. "Kalau begitu hanya 8 (provinsi) yang tidak atau belum ketangkap," ucap Firli.

Para calon kepala daerah mendapatkan wanti-wanti dari KPK mengenai korupsi. Data KPK menunjukkan bahwa laporan korupsi oleh kepala daerah sering kali berasal dari orang-orang terdekatnya. "Laporan korupsi itu yang dilakukan oleh kepala daerah pasti (dari) orang terdekat. Kami ambil contoh, kami menangkap bupati yang lapor istrinya, coba Pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi, kira-kira apa jawabannya kenapa," ujar Firli.

Firli mengatakan istri bupati itu tidak menikmati uang dari suaminya. Sebab, lanjut Firli, uang dari bupati itu mengalir ke istri-istrinya yang lain. "Karena dia hanya menerima, tapi tidak menikmati. Begitu terima uang itu langsung digeser ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima," kata Firli. "Dia foto kepada kita, Pak. Ini pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin kampanye saya habis-habisan, begitu sudah jadi ternyata distribusinya istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Firli menambahkan, meski banyak kepala daerah yang ditangkap KPK, hal itu bukan tujuan utama lembaga antirasuah. Ia menyebut, perang terhadap korupsi tak bisa hanya dengan penangkapan saja. Tetapi ada sektor lain seperti pencegahan dan pendidikan masyarakat yang juga harus dilakukan.

"Tapi kami tidak ingin hanya melakukan penangkapan. Karena penangkapan itu tidak menghentikan perang terhadap korupsi. Tidak pernah memberantas atau hentikan orang, (membuat) tidak melakukan korupsi," pungkasnya.

Lalu Firli menyebutkan pekan depan akan ada 2 kepala daerah yang ditahan KPK. Namun Firli tidak menyebutkan siapa. "(Tahun) 2020 ini kami sudah tahan 1, 2, 3, sudah 3 kepala daerah yang kita tahan. Terbaru kemarin Tasik (Wali Kota Tasikmalaya)," ujar Firli. "Nanti minggu depannya ada Pak, Bapak lihat saja nanti, minggu depannya ada lagi, bupati dan wali kota," imbuhnya.

Tak selang berapa lama, KPK mengumumkan

penetapan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus sebagai tersangka kasus mafia anggaran. Terhadap Kharuddin, KPK langsung melakukan penahanan.

"Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi dan juga kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, kepada wartawan, Selasa (10/11).

Kharuddin akan ditahan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. Selain Kharuddin, KPK juga menetapkan mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Puji Suhartono (PJH). "Tersangka PJH di Rutan Polres Jakarta Timur," ujar Lili.

Seperti diketahui, nama Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah Sitorus disebut dalam dakwaan Yaya Purnomo. Dalam dakwaan itu, Kharuddin disebut memberikan gratifikasi senilai Rp 400 juta dan SGD 290 ribu kepada Yaya Purnomo terkait DAK Labuhanbatu Utara 2018.

Yaya Purnomo yang merupakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN tahun 2018.

Selain itu, Yaya terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp 6,5 miliar, USD 53 ribu, dan SGD 325 ribu, yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang

berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Penerimaan itu berkaitan dengan jasa Yaya yang menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan.

KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Hingga kini sudah ada sejumlah pihak yang dijerat sebagai tersangka dan bahkan juga sudah divonis bersalah, salah satunya eks Anggota DPR Sukiman.

Sebelumnya, juga terdengar kabar KPK memeriksa Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Selasa (10/11). Belum diketahui pemeriksaan Aa Umbara tersebut berkaitan dengan kasus apa.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Aa Umbara tersebut. "Sebagaimana informasi yang kami terima, benar ada permintaan keterangan yang bersangkutan terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK," ujar Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin siang.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan terkait kasus apa pemeriksaan terhadap Aa Umbara itu. Sebab, hal tersebut masih dalam penyelidikan. "Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud," tuturnya. Beberapa waktu sebelumnya juga sempat beredar kabar Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sempat diamankan KPK. Namun informasi tersebut tidak terbukti. (ist,ins)

PELAKU KORUPSI BERDASARKAN PROFESI (Periode 2004-2019)

- Anggota DPR dan DPRD: 274 orang;
- Kepala Kementerian /Lembaga: 28 orang;
- Duta Besar: 4 orang;
- Komisioner: 7 orang;
- Gubernur: 21 orang;
- Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Bupati-Wakil Bupati: 122 orang;
- ASN eselon 1, 2, dan 3: 230 orang;
- Hakim: 22 orang;
- Jaksa: 10 orang;
- Polisi: 2 orang;
- Pengacara: 12 orang;
- Swasta: 308 orang; dan
- Korporasi: 6 perusahaan.



PELAKU KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH (Periode 2004-2019)

- Jawa Timur: 14 orang
- Sumatera Utara: 13 orang
- Jawa Barat: 13 orang
- Jawa Tengah: 9 orang
- Sumatera Selatan: 6 orang
- Sulawesi Utara: 6 orang
- Riau: 5 orang
- Papua: 5 orang
- Lampung: 5 orang
- Sulawesi Utara: 4 orang
- Kaltim: 4 orang
- Banten: 4 orang
- Aceh: 4 orang
- NTB: 3 orang
- Maluku Utara: 3 orang
- Kepri: 3 orang
- Bengkulu: 3 orang
- Sulsel: 2 orang
- NTT: 2 orang
- Kalsel: 2 orang
- Sulteng: 1 orang
- Kalteng: 1 orang
- Kalbar: 1 orang
- Jambi: 1 orang



KONI JATIM APRESIASI PAHLAWAN OLAHRAGA JAWA TIMUR



Surabaya- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur kembali memberikan penghargaan kepada mantan atlet Jatim yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kali ini sepuluh pahlawan olahraga asal Jatim menerima apresiasi tepat di Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung di KONI Jatim. "Ini hanya salah satu bentuk apresiasi atas jasa-jasa dan perjuangan mereka yang telah mengharumkan nama Jatim dan negara di forum internasional," kata Erlangga.

Dari sepuluh mantan atlet yang menerima penghargaan, hanya delapan orang yang hadir, dua yang lain berhalangan. Delapan mantan atlet itu adalah Yusuf

Ekodono (sepakbola), Tarwi (balap sepeda), Sodik Pamungkas (tinju), Suparji (anggar), Musiamin (atletik), Pranoto (pencak silat), Wongso Suseno (tinju) dan Agus Setiawan (atletik).

Penghargaan kepada mantan atlet Jatim yang berprestasi ini, merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya, KONI Jatim telah memberikan penghargaan dua kali kepada 14 mantan atlet berprestasi. Dengan demikian, total jumlah mantan atlet berprestasi yang menerima penghargaan hingga tahun 2020 sebanyak 24 orang.

"Dalam setahun ada dua hingga tiga kali kita memberikan tali asih. Mereka yang mendapat tali asih kali ini kurang beruntung ekonominya," ungkapnya.

Erlangga juga menyinggung persiapan

atlet Jatim menghadapi PON 2021 di Papua. Di era pandemi Covid-19, KONI Jatim menerapkan Puslatda New Normal (PNN) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan atlet. "PNN dilakukan secara ketat. Atlet yang menghuni PNN harus memiliki kedisiplinan tinggi. Kalau ada atlet yang ketahuan melanggar aturan pasti kena sanksi," jelasnya.

Dalam pandemi Covid-19 ini, lanjut Erlangga, harus menyiapkan diri dengan kondisi apapun yang terjadi. Pihaknya berharap tahun 2021 nanti, Covid-19 bisa hilang sehingga kondisinya menjadi normal kembali. "Kalau melihat trennya secara nasional maupun Jatim sudah mulai turun signifikan. Papua juga demikian, pada 2021 kondisinya sudah normal," tuturnya. (adv)



BRASIL STOP UJI KLINIS VAKSIN CORONA SINOVAC, ADA APA?

Jakarta - Brasil menghentikan sementara uji klinis fase akhir vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech. Penghentian uji klinis vaksin Sinovac bernama CoronaVac ini pada 29 Oktober 2020, mengutip pernyataan Badan Kesehatan Brasil Anvisa, seperti dikutip Reuters, Selasa (10/11/2020).

Instituto Butantan Sao Paulo, yang bermitra dengan Sinovac untuk memproduksi vaksin secara lokal, mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan tersebut dan sedang mencari detail tentang apa yang terjadi dalam penelitian tersebut.

Direktur Instituto Butantan Sao Paulo Dimas Covas dalam sebuah wawancara TV tolak mengatakan ada salah satu relawan yang meninggal tetapi "kematian itu tidak terkait dengan vaksin" sehingga ia heran atas keputusan Badan Kesehatan Brasil.

"Ada lebih dari 10.000 relawan [vaksin] saat ini, kematian dapat terjadi ... Ini adalah kematian yang tidak ada hubungannya dengan vaksin dan karena itu bukan saatnya untuk menghentikan uji coba," kata Dimas Covas.

Regulator kesehatan, Anvisa, tidak memerinci apakah insiden itu terjadi di Brasil - tempat uji coba dilakukan - atau di negara lain. Juga tidak disebutkan mengapa berita acara Oktober baru dipublikasikan sekarang.

Sinovac menjadi vaksin ketiga yang uji klinisnya dihentikan. Sebelumnya, uji klinis vaksin AstraZeneca dihentikan karena relawan menderita penyakit aneh setelah disuntik vaksin. Vaksin Johnson & Johnson juga dihentikan uji klinis.

AstraZeneca dan Johnson & Johnson sudah melanjutkan uji klinis karena kasus tersebut tak terkait vaksin. Kasus kematian relawan juga terjadi pada AstraZeneca setelah diselidiki relawan tidak mendapatkan vaksin sebenarnya, hanya placebo.

Indonesia Lanjut

Sementara itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjajaran Kusnandi Rusmil mengatakan, 1.620 orang yang menjadi subyek uji klinis vaksin Sinovac telah selesai disuntik. Setelahnya, tim uji

klinis memantau kondisi semua subyek uji klinis vaksin asal China itu.

"Untuk uji klinis di Bandung ada 1.620 subyek penelitian dan semuanya telah disuntik selesai. Jadi sudah tidak ada suntikan lagi. Tinggal diikuti (perkembangannya)," ujar Kusnandi dalam talkshow daring Forum Merdeka Barat 9, Selasa (10/11).

Menurut dia, sebelum disuntik, para relawan sudah diambil sampel darahnya. Sebulan setelah penyuntikan, sampel darah mereka kembali diambil. "Tiga bulan setelah disuntik diambil darah lagi dan enam bulan diambil darah lagi. Maksudnya, untuk evaluasi kadar zat anti-nya," ucap Kusnandi.

Selain itu, pengambilan sampel darah secara bertahap tersebut bertujuan mengevaluasi keamanan vaksin Sinovac. Meski begitu, Kusnandi menyebut, hasil akhir perbandingan itu tidak hanya diambil dari data uji klinis di Indonesia. Sebab, dibutuhkan subyek uji klinis hingga puluhan ribu atau lebih banyak dari subyek di Indonesia untuk kesimpulan itu. "Harusnya mungkin diambil juga dari Brazil, India, dan sebagainya," kata Kusnandi. (ist)